**KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH**

**(Telaah Kritis Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)**

**Oleh : lne Mariane**

Selama kurang lebih tiga dekade republik ini berada di bawah penguasa yang cenderung otoriter diktator sehingga nyaris seluruh polici pemerintahan diputuskan oleh satu orang. Tidak ada musyawarah di sana. Kalaupun ada rapat hanya bersifat dengan pendapat atas apa yang telah diputuskan sebelumnya di belakang meja sang penguasa tunggal tersebut. Forum rapat atau musyawarah hanya menyepakati bukan membahas secara kritis, cermat dan seksama, apakah kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat banyak ataukah tidak.

Keberadaan birokrasi pemerintahan dengan demikian identik dengan paduan suara yang bernada dasar sama. Pemerintahan dipimpin oleh rezim yang benar-benar memaksakan kehendak orang per orang demi kebahagiaan kelompoknya, bahkan keluarganya. Aspirasi arus bawah hanyalah aspiarsi yang senantiasa ditampung dalam ruang sidang dan ditilep kembali setelah sidang para birokrat berakhir. Antara aspirasi rakyat banyak dengan pejabat adalah pembantu penguasa yang dianggap telah memberikan nyawa untuk hiclup anak, istri dan sanak saudara. Membantah perintah pimpinan sarna artinya mencabut nyawa dari tubuhnya.

Posisi pimpinan adalah segala- galanya, karena pimpinan negara tidak identik dengan pemegang amanat, namun identik dengan penguasa tunggal yang memiliki otoritas dalam segala wilayah kehidupan masyarakatnya. Pimpinan negara tidak pernah ada dalam kurun baru itu. Yang ada hanyalah penguasa yang menghisap secara pelan-pelan namun pasti, kemerdekaan serta harkat dan martabat kemanusiaan seluruh rakyat. Dengan kondisi seperti ini memaksa 'para pembantunya' tunduk dan patuh atas apa yang menjadi perintah atasan. Pelayanan atas masyarakat banyak mandeg. Birokrasi yang semestinya melayani rakyat, berbanding terbalik menjadi 'jongos' dan pembantu penguasa.

Kesemrawutan aparat birokrasi terasa di segala bidang kemasyarakatan , dari tingkat RT, RW, desa sampai pejabat kepresidenan. Segala jenis urusan publik hanya akan lancar jika disertakan di dalamnya (di bawah tangan) uang siluman sebagai balas jasa. Jika dijumpai seorang pejabat yang bersikap tegas, jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan justru dianggap mahluk aneh dan langka . Akhirnya ia akan teralienasi karena dianggap penghalang atau membahayakan kedudukan.

Pejabat birokrasi yang bisa ''membawa diri" itulah yang bisa berharap langgeng dalam memegang kursi jabatannya. Bahkan yang dianggap sebaik-baiknya aparat birokrasi adalah yang pandai berkata 'ya,' sekalipun itu salah dan pandai berkata salah sekalipun benar. Kejujuran adalah barang yang amat langka. Kejujuran hanya terdapat dalam kitab­ kitab suci para nabi. Kejujuran dalam birokrasi adalah omong kosong. Jujur sebagai pejabat identik dengan tidak mau hidup enak. Orang boleh jujur, tapi bukan dalam urusan birokrasi. Jujur hanya bunga-bunga pembicaraan sehari-hari, bukan dalam praktik. Antra perktaan dan praktik aclalh persoalan lain, ·karena orang akan lebih mudah berkata, ketimbang melakukannya. Menyeimbangkan antara perkataan clan perbuatan saat Suharto masih berkuasa dalam konkritnya, sebuah rezim yang penuh kecurangan, manipulasi, korupsi dan kolusi (KKN) ibarat sebutir emas yang jatuh di tengah samudra. Birokrasi bangsa ini hancur morat marit tak berwibawa dimata rakyat. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah nyaris tak berbekas. Pemerintah telah kehilangan muka dimata rakyatnya sendiri akibat perbuatan rezim yang penuh dengan keculasan; kecurangan dan kemunafikan.

ltulah yang terjadi selama kurang lebih 32 tahun lalu di bawah rezim orde baru yang zalim terhadap amanat rakyat yang diberikan kepadanya. Akan kah sebuah rezim yang korup, manipulate dan aniaya diteruskan, sementara tuntutan dunia karena pengaruh globalisasi dan demokratisasi menghendaki sebuah clean government? Apakah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rezim yang jujur dan berwibawa sehingga rakyat mempercayai sebagai sebuah aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa ?

Bagaimana dengan pemerintahan sekarang? Tampaknya pemerintah yang baru harus menanggung semua 'dosa' yang telah diwariskan oleh rezim orde baru. Hampir semua infrastruktur kenegaraan dan masyarakat hancur berantakan. Mulai dari hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, krisis ekonomi yang berkepanjangan , masih maraknya kasus KKN, krisis politik yang tiada henti, isu pelanggaran hak asasi manusia hingga ancaman disintegrasi bangsa terus menghantui pemerintahan baru untuk mengatasi semua persoalan bangsa yang merenggut kesejahteraan rakyat ini? Memang tidak mudah menterjemahkan dan menjawab pertanyaan tersebut mengingat kompleksnya persoalan yang dihadapi. Akan tetapi tentu saja semua persoalan bangsa ini bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Hal ini berkaitan dengan strategi dan persoalan waktu ya ng membutuhkan kesabaran ekstra.

Dalam konteks tersebut, penulis mengajukan beberapa lontara yang mungkin bisa memberikan kontribusi pemikiran paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk mengatasi persolan bangsa tersebut.

Pertama, dalam membangun kredibilitas pemerintahan di mata rakyat tampaknya perlu segera dilakukan upaya untuk membentu aparatur negara (birokrat) yang responsif dan bertanggung jawab. Upaya untuk menciptakan aparatur negara yang mau mendengar dan dengan demikian bisa bersikap responsif terhadap tuntutan masyarakat serta bertanggung jawab atas kewajibannya dapat dilakukan melalui subtansi latihan (training) yang memberikan tekanan pada masalah nilai-nilai (values) penghargaan terhadap kepentingan masyarakat.Upaya ini tentu saja tidak semudah membalikkan tangan, karena bi.ldaya lama yang sudah sangat inheren dengan kehidupan para birokrat tidak akan mudah ditinggalkan begitu sja. lni membutuhkan keseriusan dari semua pihak, terutama dari kalangan birokrat sendiri karena persoalan tersebut menyangkut maslah tanggung jawab moral dan etika seorang birokrat.

Kedua, sudah waktunya pula kita membuat sistem pertanggungjawaban menteri atau pejabat tinggi pemerintah kepada DPR selain kepada presiden. Memang kita akui bahwa dalarn sistem presidensial yang kita anut tidak mengenal pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Namun, mesti dipahami bahwa sistem presindensial yang selama ini kita agungkan tersebut ternyata telah rnenimbulkan cara baru untuk tidak bersedia bertanggungjawab dan berlindung di belakang presiden, jika seorang menteri melakukan sesuatu yang mengharuskan diminta untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban menteri atau pejabat tinggi negara kepada DPR tersebut harus memungkinkan tumbuhnya sikap bertanggung jawab para menteri dan pejabat tinggi serta memungkinkan pergantian mereka oleh presiden jika yang bersangkutan dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

Abdurrahman Wahid misalnya waktu itu tampaknya merupakan upaya konkrit dalam mentejemahkan konsep ini. Namun sangat disayangkan proses yang dilakukan oeleh presiden Gus Dur sepertinya tanpa pertimbangan yang matang sehingga muncul kesan lahirnya 'kabinet bongkar pasang'. Bahkan dalam perjalanannya pergantian para menteri dan pejabat tinggi negara justru melahirkan berbagai persoalan baru. Kasus menteri Yusuf Kalla dan Laksamana

Sukardi merupakan salah satu kebijakan yang dianggap kontroversial, bahkan sempat mengundang protes dari anggota DPR. Kasus yang hampir juga muncul saat Kapolri dicopot dari jabatannya tanpa ada konfirmasi dan persetujuan dari DPR. Padahal pengangkatan dan pemberhentiannya sudah diatur lewat Tap MPR. lnipun sangat mengundang polemik yang cukup panjang. Jadi, dalam konteks ini presiden dituntut memiliki ketegasan juga kearifan dan kematangan dalam menterjemahkan "sebuah kesalahan" yang dilakukan bawahannya. Artinya pemberhentian atau pengangkatan seorang pejabat perlu dilakukan dengan cara bijaksana serta membutuhkan human relations yang baik dari presiden . Jangan karena soal isu kemudian seorang menteri langsung "dibebastugaskan' tanpa adanya pembelaan yang memadai dari yang bersangkutan.

Ketiga, perlunya optimalisasi peran lembaga kontrol yang harus diarahkan pada perbaikan kinerja lembaga eksekutif dan lembaga pemrintahan lainnya serta bukan diarahkan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Seiring dengan merebaknya arus demokrasi , peran lembaga kontrol tampaknya sudah merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perlu diakui bahwa selama pemerintahan orde baru lembaga kontrol nyaris tak punya peran yang signifikan. Pertanyaannya sekarang bagaimanakan peran lembaga kontrol pada era reformasi saat ini?

Sejalan dengan perubahan konstelasi politik Indonesia dewasa ini. memang terlihat adanya perubahan yang sangat signifikan dari lembaga kontrol terutama dari lembaga DPR. Lembaga kontrol saat ini bahkan cenderung superior terhadap lembaga eksekutif. Sehingga muncul satu sikap yang dianggap terlalu berlebihan , seperti merebaknya kasus penolakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) beberapa kepala daerah dan penolakan calon kepala daerah yang sebelum nya dianggap tabu (dtabukan) . Selain itu, tak jarang beberapa kebijakan pemerintah kandas gara-gara tidak disepakati oleh DPR.

Keempat,.yang perlu dilakukan dalam mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah adalah mengurangi konsentrasi pendekatan 'power' dalam menjalankan manjemen birokrasi pemerintah. Dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis saat ini, fokus kekuasaan manajemen birokrasi pemerintahan seyogyanya diarahkan sesuai dengan proporsi yang sebenamya yaitu publik service, birokrasi pemerintahan tidak boleh lagi digunakan untuk menakut-nakuti rakyat dan hanya menjadi alat penguasa semata. Manajemen birokrasi pemerintahan hendaknya mampu memberikan peluang kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bukan mematikan pertisipasi rakyat.

Kelima, fenomena lain yang tak kalah pentingnya dalam membangun pemerintahan yang berwibawa adalah penyelesaian kasus KKN, khususnya yang melibatkan mantan presiden Suharto beserta kroni-kroninya. Yang perlu diketahui bahwa belakangan ini banyak terungkap kasus berindikasikan penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik. Walaupun menyangkut kepentingan publik, kasus-kasus tersebut kerap tertutup dari pengamatan publik, dan akhirnya menempatkan publik sebagai pihak yang dirugikan. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak sering kali diputuskan tanpa melibatkan publik, dilakukan tanpa transparan , dan tanpa laporan tentang pelaksanaannya.

Memang pemerintahan baru telah merniliki legitimasi rakyat, melalui pemilu yang demokratis. Hanya persoalannya, sejauh mana penegak hukum dalam hal ini lembaga peradilan mau dan tak mampu menegakkan supremasi hukum tersebut. Dalam konteks ini, Romli Atmasasmita (2000) , justru meragukkan tegaknya supremasi hukum berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN tersebut. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan. pertama adanya kemandulan yang bersifat klasik dan biasa didengungkan oleh praktisi hukum dengan dalih bahwa subtansi undang-undang yang berlaku sangat lemah terutama mengenai hukum pembuktiannya yang menuntut jaksa penuntut urnum harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang diperoleh secara melawan hukum. Kedua, bahwa pihak kejaksaan Agung selalu mendalihkan bahwa penyidikan kasus korupsi sering diakhiri dengan kesimpulan bahwa masalah hukum dalam kasus korupsi seperti kasus Suharto sering terjadi "dilematis." Dua persoalan tersebut, menurut Romli senantiasa menjadi ganjalan dalam menegakkan supremasi hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Keenam , persoalan lain yang patut dicermati oleh pemerintahan adalah munculnya kasus disintegrasi bangsa yang sudah di pelupuk mata. Kasus di Timor Timur tidak boleh terjadi di tempat lain seperti Aceh, lrian Barat, dan Riau. Biarlah Timor Timur menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai bangsa yang berdaulat sehingga untuk ke depan kita tidak kecolongan untuk yg kedua kalinya.